

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori *Good Governance***

*Good Governance* adalah kumpulan peraturan yang harus diterapkan untuk memastikan organisasi beroperasi secara efektif, efisien dan memberikan nilai jangka panjang untuk pemangku kepentingan, serta menjaga keseimbangan antara faktor internal dan eksternal perusahaan. *Good Corporate Governance (GCG)* atau *Good School Governance (GSG)* dalam konteks pendidikan. Menurut Ufairah & Murtanto, (2023) terdapat 3 prinsip utama.:

- Transparansi , yaitu keterbukaan dalam menginformasikan kegiatan pengelolaan sumber daya publik,
- Akuntabilitas , yaitu tanggung jawab dalam melaporkan dan memepertanggung jawabkan tindakan kepada pihak yang membutuhkan informasi,
- Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan dan pengawasan.

Ungkapan “tata kelola sekolah yang baik” (*GSG*) mengacu pada nilai-nilai tata kelola sekolah yang baik dalam lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah. Untuk meningkatkan keterlibatan, akuntabilitas, dan keterbukaan di sekolah serta meningkatkan efisiensi penanganan keuangan BOS, *GSG* berupaya memberikan masukan mengenai struktur tata kelola sekolah yang kuat. Di sini, efektivitas mencakup unsur-unsur penting yang mempengaruhi kapasitas seseorang untuk memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat mendorong inovasi. Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada kemampuan sekolah untuk secara kreatif

memilih strategi yang paling tepat untuk memenuhi tujuan yang ditentukan (Thanwain, Ahmad Jumarding, 2023).

### **2.1.2. Teori Stakeholder**

Stakeholder mempunyai pengaruh yang besar terhadap organisasi yang baik, menurut Ghozali dan Chariri (2007). Semakin banyak pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses, semakin besar kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian. Setiap penyelenggaraan di bidang pendidikan memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, pengawas, administrator, guru, orang tua, komite sekolah, dewan sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Ada tiga kategori di bidang pendidikan: sekolah, pemerintah, dan komunitas (Rakhmawati, 2018).

Teori *stakeholder* mengemukakan bahwa harus beroperasi untuk memberikan manfaat kepada *stakeholder*, bukan hanya keuntungan internalnya sendiri. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan saat mengambil keputusan untuk memastikan pilihan terbaik diambil. Sekolah memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, komite sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan, dengan mengelola keuangan BOS. Para *stakeholder* tersebut berhak mendapatkan informasi pengelolaan dana BOS. Ketika sekolah memberikan manfaat kepada *stakeholder* dan mengikut sertakan mereka, maka dengan ini dikatakan bahwa pengelolaan dana BOS disekolah telah dilaksanakan dengan efektif (Ufairah & Murtanto, 2023).

### 2.1.3. Partisipasi

Proses yang disebut “partisipasi” mencakup keterlibatan aktif individu dan kelompok pemangku kepentingan (warga negara dan masyarakat) dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara individu atau kolektif. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk memberdayakan anggota masyarakat dan siswa untuk menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan sekolah (Haniyyah, 2014).

Tingkat partisipasi yang lebih tinggi mencerminkan peran lebih signifikansi dari masyarakat dalam penentuan kebijakan. Untuk meningkatkan partisipasi publik, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan (Rahmawati, 2018) :

- 1) Membuat pengetahuan tersedia untuk khalayak umum
- 2) Menyelenggarakan konsultasi untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan
- 3) Memberikan wewenang khusus terhadap penggunaan pelayanan publik, seperti mengatur dan mengarahkan acara dan persembahan publik.

Berpartisipasi dalam anggaran memberikan manfaat bagi manajer tingkat bawah dan menengah dengan meningkatkan tugas dan tantangan, mendorong inovasi, dan berbagi pengetahuan, yang semuanya pada akhirnya dapat mengarah pada peningkatan kinerja. (Ufairah & Murtanto, 2023).

Keterlibatan partisipasi manajerial tingkat menengah dan bawah dalam proses anggaran mampu membantu dalam menghasilkan keputusan yang lebih realistis, Partisipasi dalam penyusunan anggaran

pada dasarnya memerlukan kerja sama. Karena manajemen puncak biasanya kurang memahami operasi sehari-hari yang rumit, mereka harus memperoleh data anggaran yang tepat dari tingkat yang lebih rendah. Namun, manajer senior melakukan pendekatan terhadap penyusunan anggaran dari sudut pandang strategis yang luas (Achmad, 2019).

#### **2.1.4. Efektivitas**

Efektivitas menggambarkan sejauh mana sebuah program berhasil dilaksanakan, di mana semakin sukses pelaksanaannya, semakin tinggi tingkat efektivitas. Indikator efektivitas menilai sejauh mana hasil dari program tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan yang diharapkan (Amara, 2024).

Efektivitas adalah sejauh mana hasil tertentu dihasilkan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Pengeluaran Secara Bijaksana). Tiga komponen utama yang membentuk efikasi dalam bidang pendidikan: fungsi produksi, fungsi produksi psikologis, dan fungsi produksi administratif (Pamungkas, 2021).

Efektivitas pencapaian suatu tujuan dapat diukur melalui standar kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian Rakhmawati, (2018), kriteria tersebut meliputi:

- 1) Mendefinisikan tujuan dengan jelas
- 2) Strategi pencapaian tujuan yang jelas
- 3) Diperlukan prosedur analisis dan formulasi yang kuat.
- 4) Persiapan yang cermat
- 5) Menyiapkan perangkat lunak yang sesuai
- 6) Aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas
- 7) Eksekusi berhasil

#### 8) Sistem pengelolaan dan pengendalian pendidikan

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan diperlukannya keterlibatan orang tua yang terbuka, akuntabel, dan orang tua dalam pengelolaan uang pendidikan maka akan tumbuh kesadaran masyarakat terhadap sumber pendanaan sekolah. Partisipasi yang lebih besar dari orang tua dapat menunjukkan efektivitas pengelolaan sudah menjadi program yang berjalan baik. Namun apabila terjadi kegagalan ini disebabkan oleh potensi penyalahgunaan anggaran yang kurangnya akuntabilitas dan transparansi (Yusra et al., 2021).

#### **2.1.5. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Untuk mendukung program wajib belajar, pemerintah meluncurkan program BOS untuk menutupi belanja operasional pendidikan dasar dan belanja non-pegawai. Biaya satuan menjadi dasar penghitungan dana yang diperoleh sekolah (Unit Cost). pengelolaan uang BOS oleh sekolah untuk membiayai biaya operasional tanpa membebani siswa. Secara umum, pendekatan ini mengurangi beban keuangan masyarakat dalam membiayai pendidikan. (Adytira Rachman, Cucu Hayati, 2023).

Pemerintah berupaya mendanai program wajib belajar 12 tahun melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif sesuai dengan undang-undang terkait. Ada beberapa konsep manajemen yang perlu diikuti, antara lain:

- 1) Fleksibilitas, yang berarti pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi sekolah.

- 2) Efektivitas, yang memerlukan penggunaan sumber daya sebaik mungkin untuk meningkatkan standar pembelajaran dengan biaya serendah mungkin
  - 3) Efisiensi, yang berarti dana dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pengeluaran minimal namun harus hasil maksimal
  - 4) Akuntabilitas, dimana setiap kegiatan yang didanai harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang baru berlaku
  - 5) Transparansi, yang mengharuskan pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan.
- Nomor 2 Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Riset dan Teknologi.

Program BOS menysar anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kurang beruntung dalam upaya memperluas akses terhadap pendidikan. Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dari latar belakang yang kurang beruntung dapat terus melanjutkan pendidikan mereka tanpa terkendala oleh masalah keuangan (Septiningrum et al., 2023).

#### **2.1.6. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merujuk kepada pertanggung jawaban yang dimiliki pemegang amanah (agen) untuk melaporkan, mengungkapkan, akuntabilitas dapat diartikan dalam literatur lain sebagai tugas untuk menjelaskan dan memberikan laporan tentang kinerja dan pelaksanaan tindakan organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban. dan memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dikelolanya kepada pihak pemberi amanah

(prinsipal). Prinsipal berhak dan berwenang meminta penjelasan dan evaluasi kepada agen (Pamungkas, 2021).

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan sekolah mencakup kewajiban untuk transparansi, yaitu dengan menyebarkan informasi mengenai beberapa aspek penting (Haniyyah, 2014) :

- 1) Proses pembuatan dan implementasi kebijakan serta perencanaan
- 2) Anggaran sekolah termasuk pendapatan dan belanja
- 3) Mengorganisir bahan ajar di lingkungan kelas
- 4) Tercapainya maksud dan tujuan yang telah ditetapkan atau kekurangannya

Akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja sekolah dapat dipercaya dan efektif ataupun dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Hal ini sekolah diharapkan memahami kewajiban mereka untuk memberikan laporan yang jelas mengenai hasil kerja mereka kepada publik. Lebih jauh lagi, akuntabilitas berupaya mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diterima serta efektivitas kinerja sekolah, melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengawasan, dan memastikan bahwa komitmen terhadap pelayanan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas kepada publik (Arifah, 2021).

### **2.1.7. Transparansi**

Transparansi berasal dari kata *Transparent*, berarti adanya kejelasan keterbukaan dalam menyajikan informasi. dalam konteks ini, transparansi merujuk pada prinsip keterbukaan informasi, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses atau dapat menerima informasi mengenai berbagai aspek pengelolaan, termasuk kebijakan, proses dan hasil yang dicapai. Dalam lingkungan pendidikan, transparansi keuangan berkaitan dengan pemerintah,

masyarakat, dan orang tua yang menerima laporan keuangan transparan yang mencakup rincian tentang sumber dan penggunaan uang. Menurut Dinata dkk. (2023), transparansi BOS mencakup transparansi dalam cara pengelolaan dana untuk mendorong pengembangan dan kelangsungan sekolah.

Berpedoman pada Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pedoman Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, transparansi dalam pelayanan publik mencakup berbagai aspek penting, seperti manajemen dan pelaksanaan pelayanan, prosedur yang berlaku, persyaratan teknis dan administratif, rincian biaya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan, pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, lokasi layanan, komitmen pelayanan, standar pelayanan publik, serta informasi terkait pelayanan (Rahmawati, 2018).

Prinsip transparansi dalam PP 48 Tahun 2008 mengharuskan pemerintah, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mematuhi standar kesusilaan dan tata kelola pemerintah yang baik. Audit yang mematuhi standar yang mengupayakan opini audit wajar tanpa pengecualian dan harus bertanggung jawab secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menilai kepatuhan ini. Keterbukaan ini didapatkan akan meningkatkan keberlanjutan lembaga, dimana semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, semakin besar kepercayaan yang diberikan (Amara, 2024).

Transparansi informasi diperkirakan akan mengarah pada persaingan politik yang toleran dan sehat serta kebijakan yang sadar akan preferensi publik. Untuk keterlibatan masyarakat yang sehat, transparansi merupakan kebutuhan yang krusial karena (Nupus, 2021):

- 1) Pengetahuan anggaran yang tidak memadai menghalangi masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan.
- 2) Untuk mempengaruhi kebijakan pembiayaan dan alokasi anggaran, transparansi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak di luar lembaga eksekutif untuk menyumbangkan sudut pandang yang unik dan inovatif dalam pembahasan anggaran.
- 3) Masyarakat dapat mengawasi kinerja dan pilihan pemerintah melalui informasi dan penasihat hukum. Peran pengawasan tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kebebasan informasi.
- 4) Karena masyarakat juga dilibatkan dalam pemantauan kebijakan publik, teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan suatu kebijakan, semakin besar pula pengawasan yang akan dilakukan oleh dewan.
- 5) Berdasarkan pendapat para ahli mengenai transparansi, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah sesuatu yang nyata, jelas, dan terbuka, serta dapat dijelaskan keberadaannya.

Transparansi dapat menumbuhkan rasa saling percaya dengan memberikan informasi dan memudahkan akses terhadap informasi yang cukup dan benar bagi masyarakat, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Dengan menetapkan peraturan yang jelas mengenai kategori informasi yang boleh diperoleh, jenis informasi yang dapat diakses publik, dan jenis informasi yang bersifat rahasia, sekolah harus berupaya mendorong transparansi. Sekolah juga perlu menyediakan pengaduan memastikan bahwa informasi yang diperlukan sampai kepada publik dengan tepat (Sari, 2022).

## 2.2. Landasan Empiris (Penelitian Terdahulu)

Untuk lebih mengembangkan penelitian terkait faktor-faktor yang akan diuji, yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y), dan Partisipasi Pemangku Kepentingan (Z)—penulis penelitian ini merujuk pada beberapa hal. studi terkait sebelumnya. Berikut ini adalah ringkasan lengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Dahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi  Rakhmawati, (2018)	X1 : Akuntabilitas  X2: Transparansi  Z: Partisipasi Stakeholder  Y: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Regresi moderasi	Penelitian ini menghasikan bahwa transparansi berpengaruh negatif kepada efektivitas pengelolaan dana BOS
2	Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Pada SD Di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara : Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi  Yusra et al., (2021)	X1: Akuntabilitas  X2: Tranparansi  Z: Partisipasi Stakeholder  Y: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Regresi Linear Berganda	Partisipasi dapat memoderasi akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
3	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Studi Kasus Pada SMP N 2 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri  (Sarjana, 2016)	X1: Transparansi  X2: Akuntabilitas  Y : Pengelolaan BOSDA	Deskriptif Kuantitatif	Tranparansi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana BOSDA
4	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Orangtua Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Pada SD dan SMP  Amalia et al.,(2022)	X1: Akuntabilitas  X2: Transparansi  X3: Partisipasi Y: Dana BOS	Regresi linear berganda	Dimana Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi sangat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana BOS
5	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah Di Kota Kupang  Puteri et al., (2021)	X1: Akuntabilitas  X2: Transparansi  Y: Pengelolaan Dana BOS	Analisis deskriptif kualitatif	Masih ada beberapa sekolah di kota Kupang yang belum melakukan tranaparansi mengenai pengelolaan dana BOS.

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
6	Pengaruh Penrepan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya  Kurnia Ulfah Fadhilah et al., (2023)	X1: Prinsip Transparansi X2: Prinsip Akuntabilitas X3: Kemandirian X4: Keadilan X5: Partisipasi X6: Orientasi Konsesus Y: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Asosiatif Kausal	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tiap variabel tidak memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS
7	Akuntabilitas , Tranparansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Pada Tingkat Kecamatan Pleret, Bantul DIY  A. K. Ramadhani, (2022)	XI : Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Komitmen Organisasi Y: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Analisis linear berganda	Akuntabilitas ,Transparansi,Komitmen Organisasi mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS namun sekolah harus memperbaiki lagi agar efektifitas pengelolaan dana BOS menghasilkan outcome

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
8	Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah  Sopian & Asqolani, (2022)	X1: Kompetensi Bendahara  X2: Manajemen Bos Sekolah  X3: Teknologi Informasi  Y: Akuntabilitas	Kuantitatif dengan <i>PLS-SEM</i>	Tiap variabel memiliki pengaruh penting untuk akuntabilitas pengelolaan dana BOS
9	Pengaruh Good Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Ufairah & Murtanto, (2023)	X1: Transparansi  X2: Akuntabilitas  X3: Partisipasi  Y: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	<i>Purposive Sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS
10	Analisis Pengaruh Partisipasi, Transparansi, Demokratis dan Saling Percaya Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Rumbia)  (Prasetyowati, 2019)	X1: Partisipasi  X2: Tranparansi  X3: Demokratis  X4: Saling Percaya  Y: Pengelolaan Dana BOS	Metode <i>Probability Sampling</i>	Peneliti menemukan hasil dimana ternyata partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
11	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Septhiningrum et al., (2023)	X1: Akuntabilitas  X2: Transparansi  Y: Efektivitas	Metode Campuran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap variabel X memiliki pengaruh kepada variabel Y
12	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Sukawati Dalam Program RKAS  (Yanti, 2021)	X1: Akuntabilitas  X2: Transparansi  Y: Pengelolaan Dana BOS	Deskriptif Komparatif	Pelaporan dana BOS di SMPN 3 Sukawati sudah berjalan baik, dan sudah transparan bagi seluruh masyarakat atau stakeholder yang memerlukan laporan tersebut.
13	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, <i>Proactive Fraud Audit</i> dan <i>Whistleblowing</i> Sistem terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana BOS ( Studi Empiris pada SD Kota Ternate)  Gregorius Jeandry, (2018)	X1: Sistem Pengendalian Internal  X2; Budaya Organisasi  X3: <i>Proactive Fraud</i>  X4: <i>Whistleblowing</i>  Y: Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>Simple random sampling</i>	Peneliti menemukan hasil dimana sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan audit <i>fraud proaktif</i> pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BOS, sementara sistem <i>whistleblowing</i> tidak memiliki pengaruh

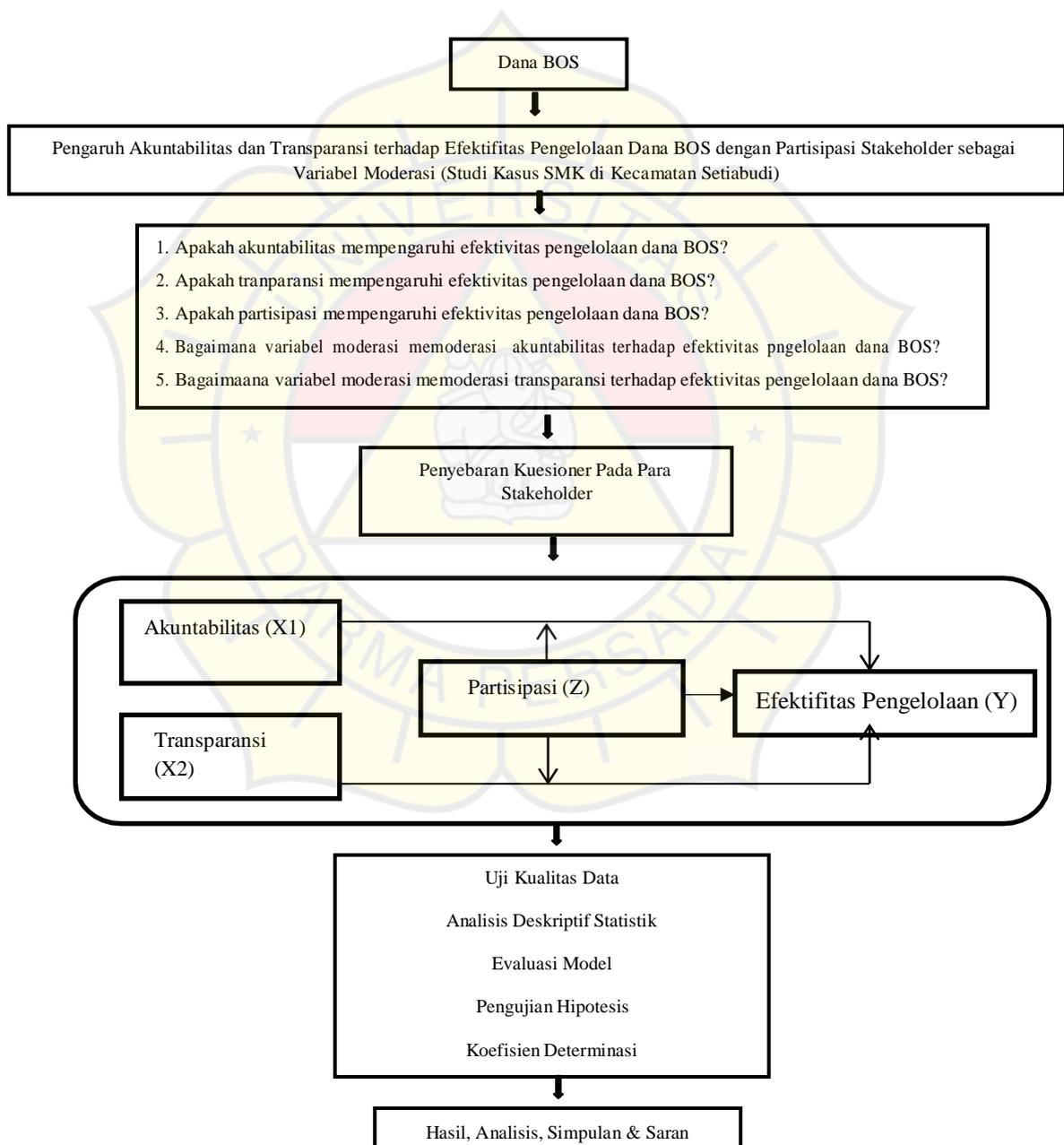
No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
14	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Pada SMPN Di Banda Aceh</p> <p>L. Ramadhani &amp; Suparno, (2020)</p>	<p>X1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</p> <p>X2: Peran Komite</p> <p>Y: Pengaruh <i>Fraud</i></p>	Analisis regresi linear	Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tiap variabel X mampu berpengaruh dengan variabel Y
15	<p>Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengaruh Budaya Organisasi, Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah di Pekanbaru</p> <p>Agustiawan et al., (2022)</p>	<p>X1: Budaya Organisasi</p> <p>X2: Proactive Fraud Audit</p> <p>X3: Whistleblowing</p> <p>X4: Pengendalian Internal</p> <p>Y: Pencegahan Kecurangan</p>	Metode Sampling Jenuh	Tiap variabel memiliki pengaruh yang signifikan, namun untuk pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
16	Pengaruh Akuntabilitas dan Tranaparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana BOS  Wele & Mildawati, (2022)	X1: Akuntabilitas  X2: Transparansi  Y: Pengelolaan Dana BOS	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS
17	Penerapan Good School School Governance Pada Efktivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah  Thanwain,Ahmad Jumarding, (2023)	X1: Akuntabilitas  X2: Transpansi  X3: Partisipasi  X4: Independen  Y: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Analisi regresi berganda	Hasil penelitian ini Variabel independen berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS
18	Pengaruh Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Reponbilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Amara, (2024)	X1: Transparansi,  X2: Akuntabilitas  X3: Reponbilitas  Y: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Kuantitatif	Peneliti menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efktivitas pengelolaan dana BOS

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2021) kerangka menjelaskan keterhubungan antara teori dengan unsur-unsur penting yang berkaitan dengan topik kajian. Contoh kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini diberikan di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

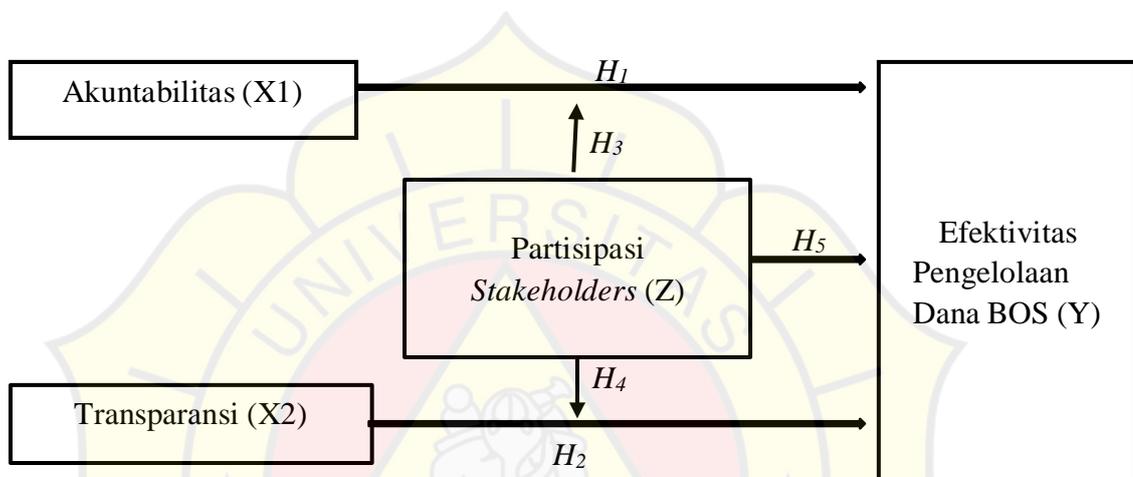


Sumber: Data yang diolah (2024)

## 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan teori pendahuluan terhadap suatu permasalahan penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya secara empiris (Pamungkas, 2021). Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh struktur hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diberikan di bawah ini:

Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual



Sumber: Data yang diolah (2024)

### 2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban mempertanggungjawabkan kinerja pihak yang berwenang (Pamungkas, 2021). Rakhmawati (2018) menemukan akuntabilitas mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS. Dengan ambang batas signifikansi sebesar 0,01 dibawah 0,05 dan nilai Thitung sebesar 2,701 lebih besar dari T tabel sebesar 2,016.

Berdasarkan penelitian Amalia et al. pada tahun 2022, responden memberikan nilai tinggi untuk akuntabilitas, yang merupakan indikator baik mengenai seberapa baik keuangan BOS dikelola.

Berikut penjabaran teori yang mendasari penelitian ini:

H1: Akuntabilitas mempengaruhi seberapa baik dana dikelola.

BOS

#### **2.4.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS**

Masyarakat dapat mengembangkan keyakinan terhadap kemampuan sekolah dalam mengelola dana BOS melalui transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang berkepentingan dapat mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) (Maimunah dkk., 2023).

Transparansi meningkatkan efektivitas penanganan uang BOS, menurut penelitian Ufairah & Murtanto (2023), dan sekolah diharapkan berbagi informasi dan melibatkan orang tua dalam proses perencanaan.

Namun penelitian lainya menunjukkan hasil yang berbeda dimana semakin transparansi justru efektifitas pengelolaan dana BOS semakin tidak efektif karena akan memperbanyak pengawasan serta masukan pihak lainnya ini menambah beban pengawasan dan masukan dari pihak, yang memperlambat proses (Rakhmawati, 2018).

Hipotesis penelitian berdasarkan uraian di atas adalah H2: Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

#### **2.4.3. Pengaruh Partisipasi Stakeholder Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS**

Partisipasi Stakeholder yang tinggi dilandasi dari keyakinan rasa memiliki, rasa tanggungjawab dan tingkat dedikasi. Hal ini bertujuan dengan berpartisipasi maka seluruh siswa dapat menggunakan haknya dan mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan kepentingan sekolah (Haniyyah, 2014).

Menurut penelitian (Rakhmawati, 2018), keterlibatan meningkat dan tidak signifikan secara statistik terhadap efisiensi pengelolaan dana BOS. Temuan serupa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di SD Tanah Jambo Distrik Aye oleh Yusra dkk. (2021), dimana keterlibatan pemangku kepentingan berdampak pada efisiensi pengelolaan uang BOS.

Berikut penjabaran teori yang mendasari penelitian ini:

H3: Keterlibatan pemangku kepentingan mempengaruhi seberapa baik dana BOS dikelola.

#### **2.4.4. Partisipasi Memoderasi Hubungan Antara Akuntabilitas Dengan Efektifitas Pengelolaan**

Penelitian Yusra dkk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa keterlibatan mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan uang BOS di SD Negeri Kabupaten Tanah Jambo, dan keterlibatan dalam pengelolaan anggaran berkorelasi langsung dengan akuntabilitas.

Studi tambahan menunjukkan temuan serupa dengan temuan Rakhmawati (2018), yang secara langsung menunjukkan bahwa keterlibatan sangat mengurangi akuntabilitas dan kemanjuran.

Berikut penjabaran teori yang mendasari penelitian ini:

Berikut penjabaran teori yang mendasari penelitian ini:

H4: Partisipasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dana BOS

#### **2.4.5. Partisipasi Memoderasi Hubungan Antara Transparansi Dengan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS**

Partisipasi secara aktif memoderasi hubungan antara transparansi dan efisiensi pengelolaan dana BOS, menurut penelitian Rakhmawati (2018). Hal ini mendukung temuan Yusra

dkk. (2021), yang juga menemukan bahwa keterlibatan berdampak pada seberapa baik dana BOS dikelola.

Menurut Trisnawati (2019), terdapat hubungan antara partisipasi pemangku kepentingan dengan efektivitas pengelolaan anggaran.

Berikut penjabaran teori yang mendasari penelitian ini:

H5: Hubungan antara akuntabilitas dan efektivitas manajerial dimoderasi oleh partisipasi.

